

LAPORAN BULAN JULI DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LK) Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan bulan Juli Tahun 2025 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sampai dengan bulan Juli 2025. Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode bulan Juli Tahun 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Laporan ini dibuat dan disusun untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan program serta kegiatan yang disertai pertanggung jawaban penggunaan anggaran sebagaimana amanat dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atas tersusunnya Laporan ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belumlah sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami kedepan. Semoga Laporan Bulan Juli Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Agustus 2025

Deputi Bidang Ketersediaan dan
Stabilisasi Pangan



Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
BAB II.....	6
RENCANA KINERJA OUTPUT/RO	6
BAB III.....	9
PELAKSANAAN KEGIATAN.....	8
A. Realisasi Fisik dan Keuangan.....	8
B. Monitoring Kegiatan Prioritas	10
BAB IV	14
PENUTUP	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pangan merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin oleh negara. Peran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan. Namun lebih jauh dari itu, pangan dengan kandungan gizi di dalamnya berperan nyata bagi peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia Indonesia yang sehat, aktif dan produktif. Oleh karena itu, penyelenggaraan pangan menjadi salah satu prioritas dalam mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan pangan diindikasikan dengan situasi dan kondisi ketahanan pangan nasional yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Ketersediaan dan stabilisasi pangan merupakan faktor kunci dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Perwujudan ketersediaan pangan dilaksanakan melalui pengelolaan neraca pangan, neraca bahan makanan, pengendalian ekspor impor, cadangan pangan pemerintah, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk memperpanjang umur simpan komoditas pangan.

Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan, pemerintah melaksanakan kebijakan dalam distribusi dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dilakukan antara lain melalui fasilitasi distribusi pangan (FDP), mobilisasi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, pelaksanaan gerakan pangan murah, penetapan kebijakan harga pangan, serta koordinasi, monitoring, dan pengawasan harga pangan.

Kewenangan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam rangka mewujudkan pangan yang tersedia dalam jumlah cukup dapat diakses dengan mudah meliputi komoditas beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas dan cabai.

Oleh karena itu, sasaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 fokus dalam mencapai: (1) Terwujudnya pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan; (2) Terwujudnya stabilisasi dan pasokan harga pangan di seluruh wilayah; dan (3) Terwujudnya cadangan pangan pemerintah dan terkelolanya sistem distribusi pangan nasional yang efisien.

Laporan kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan periode bulan Juli 2025 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama tahun 2025, laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada periode yang akan datang.

1.2 TUJUAN

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada bulan Juli 2025.
2. Melakukan Pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada bulan Juli 2025

1.3 METODOLOGI PENYUSUNAN LAPORAN

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output dari UKE 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II

RENCANA KINERJA OUTPUT/RO

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Pada rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki suatu instansi. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025.

Mengacu pada Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Penetapan Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 disusun untuk melaksanakan program dan kegiatan ketersediaan dan stabilisasi pangan. Pada tahun 2025, mengacu pada DIPA Nomor: SP.DIPA-125.01.1.690590/2025 Tanggal 2 Desember 2024, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga dengan mengampu sebanyak 6 (enam) klasifikasi rincian output (KRO) dan 6 (enam) Rincian Output (RO). Sebagai tindak lanjut pencaianan program/kegiatan tersebut, maka disusun rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Juli tahun 2025 akan dilihat dari pencapaian output/RO, komponen dan sub komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA pada bulan Juli Tahun 2025. Pada bulan Juli tersebut ditargetkan sebesar 60%. Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Target Fisik dan Keuangan Bulan JULI Sesuai DIPA Revisi II Deputi
Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan JULI 2025	
Program , Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan 60% (Rp)	Fisik
ABR- Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	370.976.000	2 rekomendasi kebijakan	222.585.600	0
	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	772.080.000	12 rekomendasi kebijakan	463.248.000	1
	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	599.954.000	6 rekomendasi kebijakan	359.972.400	1
AEA- Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	969.585.000	6 kegiatan	581.751.000	1
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	1.538.218.000	1 Kegiatan	922.930.800	1
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	6.599.177.000	1 kegiatan	3.959.506.200	1
	NSPK Ketersediaan Pangan	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	257.680.000	6 NSPK	154.608.000	0

AFA- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	38.400.000	10 NSPK	23.040.000	1
	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	382.621.000	14 NSPK	229.572.600	1
BDD – Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang terdistribusi	900.000.000	50 Kelompok Masyarakat	540.000.000	5
		Gerakan Pangan Murah yang diaksanakan	1.220.000.000	1 Kelompok Masyarakat	732.000.000	1
		Kios Pangan yang dikembangkan	150.070.000	1 Kelompok Masyarakat	90.042.000	1
QMA - Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	879.423.000	4 Data	527.653.800	1
	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	10.765.725.000	12 Data	6.459.435.000	1
	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	162.371.000	1 Data	97.422.600	0
BEC – Bantuan Produk	Bantuan Produk	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	8.922.080.628.000	Kelompok Masyarakat	5.353.248.376.800	2.238.906

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan kegiatan KRO dan Output untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, khususnya pada kegiatan Koordinasi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Realisasi keuangan pada bulan JULI Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan disajikan per kegiatan, KRO, RO, Komponen dan sub komponen dari masing-masing Direktorat lingkup kedeputian sebagaimana tabel 2 berikut:

Tabel 2
Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Juli Sesuai DIPA Revisi I Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Target Bulan JULI 2025		Realisasi Bulan JULI 2025	
Program , Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan 60% (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
ABR- Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	222.585.600	0	112.546.108	0
	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	463.248.000	1	419.639.252	1
	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	359.972.400	1	170.979.809	1
AEA- Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev Dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	581.751.000	1	35.350.620	0

	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	922.930.800	1	123.800.000	1
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	3.959.506.200	1	373.641.712	1
AFA- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Ketersediaan Pangan	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	154.608.000	0	5.576.825	0
	NSPK Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	23.040.000	1	2.900.000	1
	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	229.572.600	1	114.368.476	1
BDD – Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang terdistribusi	540.000.000	5	26.500.000	5
		Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	732.000.000	1	90.288.000	1
		Kios Pangan yang dikembangkan	90.042.000	1	6.014.000	1
QMA - Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	527.653.800	1	7258.547.622	0
	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	6.459.435.000	1	877.342.832	1
	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	97.422.600	0	12.918.280	0
BEC – Bantuan Produk	Bantuan Produk	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	5.353.248.376.800	2.238.906	1.652.210.052.085	2.238.906

Berdasarkan Laporan hasil realisasi fisik dan keuangan pada Ouput/RO dan komponen lingkup Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada bulan Juli tahun 2025 sebagaimana tabel di realisasi anggaran per bulan Juli 2025 berdasarkan hasil aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan sebesar Rp1.654.461.540.182,- atau 18,49% dari alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp8.947.686.908.000,-. Realisasi tersebut masih jauh dari target rencana penarikan bulan Juli 2025 sebesar Rp5.368.612.144.800 atau 60% dari pagu anggaran.

Dalam hal pencapaian realisasi fisik pada bulan Juli terdapat penambahan realisasi fisik, meliputi : 2 RO Rekomendasi, 2 RO Koordinasi, 2 RO NSPK, Pangan Terdistribusi 5 Kelompok Masyarakat, 1 Kelompok GPM, 1 Kelompok Kios Pangan, dan 1 RO Data dan Informasi serta 2.238.906 paket bantuan pangan.

Rendahnya reaisasi pada bulan Juli disebabkan karena adanya penambahan anggaran pada penyaluran Bantuan Pangan sebesar 253% dari alokasi anggaran sebelumnya. Penambahan anggaran Bantuan Pangan tersebut untuk membiayai program bantuan pangan dan Program Beras SPHP. Selain itu terdapat penambahan anggaran untuk RO Koordinasi sebesar 20% dari alokasi anggaran sebelumnya. Alokasi anggaran yang cukup besar tidak diikuti dengan capaian realisasi yang diharapkan berdasarkan target. Demikian juga belum meratanya penyerapan anggaran di masing-masing RO di setiap Direktorat yang diakibatkan perencanaan kegiatan tidak terjadwal secara rutin. Terdapat sisa anggaran yang relative besar sehingga perlu dibuat perencanaan bulanan secara terukur sehingga pada akhir tahun tidak terjadi permasalahan.

B. Monitoring Kegiatan Prioritas

Hasil Monitoring Kegiatan prioritas lingkup Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama bulan Juli 2025 sesuai dengan capaian realisasi keuangan, namun proses pelaksanaan kegiatan tetap diselenggarakan untuk mencapai realisasi fisik melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

a) Direktorat Ketersediaan Pangan

1. Pertemuan Updating Proyeksi Neraca Pangan bulan Juli 2025
2. Pemantauan Ketersediaan Pangan Strategis di tingkat produsen dan pasar di Daerah
3. Pertemuan koordinasi yang diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Pangan dalam rangka pembahasan neraca komoditas pangan strategis
4. Rapat Pelaksanaan Kajian Ketahanan Stok Pangan

5. Penyusunan pedoman Neraca Bahan Makanan
6. Pertemuan pembahasan aplikasi NBM, Proyeksi Neraca Pangan, dan Aplikasi Pergudangan.
7. Pembahasan Rancangan Perbadan tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan Pangan dengan Kementerian/Lembaga dan Dinas Pangan Provinsi.
8. Pertemuan Pembahasan Harmonisasi RPerbadan Persyaratan Tertentu Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan
9. Workshop Pertemuan Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi
10. Rapat Monitoring dan Evaluasi Neraca Komoditas Gula
11. Rapat Koordinasi Teknis Monev Neraca Komoditas
12. Pemantuan Stok Komoditas Pangan pada Gudang Importir.

b) Direktorat Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan

1. Rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan
2. Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
3. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan oleh pusat dan daerah
4. Pemantauan perkembangan SPHP Beras
5. Mobilisasi pangan ke daerah deficit melalui kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan
6. Pemantauan perkembangan kios pangan
7. Pemantauan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen pangan
8. Rakor Inflasi Pangan yang diselenggarakan oleh Kemendagri

c) Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan
2. Rapat Koordinasi Persiapan Penyaluran Bantuan Pangan Beras
3. Koordinasi Persiapan Penyaluran Perum BULOG
4. Rapat Koordinasi Pembahasan Petunjuk Teknis
5. Rapat Koordinasi Integrasi Aplikasi Data Penyaluran Banpang 2025
6. Rapat Konfirmasi Permohonan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Secara Kolektif
7. Rapat Koordinasi BPKP terkait Reviu Kegiatan CPP Tahun 2023-2024
8. Konsultasi Harga Tebus CBP untuk Bantuan Kemanusiaan Palestina

9. Rapat Koordinasi Pembahasan RPerbadan Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah Dan Cadangan Kedelai Pemerintah
10. Rapat Koordinasi Pembahasan RPerbadan Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah Dan Cadangan Kedelai Pemerintah
11. Rapat Koordinasi rekonsiliasi utang CPP 2023-2024
12. Rapat Pembahasan Draft Kontrak Penyaluran Bantuan Pangan Beras Juni Juli tahun 2025
13. Rapat Koordinasi Pemadanan Data KRS Pengganti Penerima Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Alokasi Januari 2024
14. Rapat Pembahasan the 4th draft APEC Food Security Ministerial Declaration dan Persiapan SOM 3 and related meetings
15. FGD terkait Pencatatan Persediaan Stok CBP yang didanai OIP serta rencana CBP sebagai BMN
16. Rapat kick off pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025
17. Rapat pembahasan Concept Notes ASEAN Local Resource-based Food Reserve (LRBFR)
18. Rapat Koordinasi Teknis terkait Optimalisasi Penguatan Rantai Pasok dan Sistem Distribusi Pangan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo (DPSPLB)
19. Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan
20. Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Pemantauan Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
21. Pemantauan Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat (LCPM)
22. Penguatan Sarana Prasarana Logistik Pangan

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional pada periode bulan Juli Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (enam) KRO dan 6 output/RO berdasarkan pembagian dari masing-masing Direktorat lingkup Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp87.921.079.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Sejalan dengan perkembangan anggaran, terjadi perubahan alokasi anggaran bulan Juli 2025 pada anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan akibat adanya penambahan alokasi anggaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sehingga menjadi Rp8.947.686.908.000,-
2. Berdasarkan pemantauan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan posisi Juli 2025, realisasi anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebesar Rp1.654.461.540.182,- atau 18,49% dari alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp8.947.686.908.000,-. Realisasi tersebut masih jauh dari target rencana penarikan bulan Juli 2025 sebesar Rp5.368.612.144.800 atau 60% dari pagu anggaran.
3. Pencapaian realisasi fisik pada bulan Juli terdapat penambahan realisasi fisik, meliputi : 2 RO Rekomendasi, 2 RO Koordinasi, 2 RO NSPK, Pangan Terdistribusi 5 Kelompok Masyarakat, 1 Kelompok GPM, 1 Kelompok Kios Pangan, dan 1 RO Data dan Informasi serta 2.238.906 paket bantuan pangan.
4. Rendahnya realisasi pada bulan Juli disebabkan karena adanya penambahan anggaran pada penyaluran Bantuan Pangan sebesar 253% dari alokasi anggaran sebelumnya. Penambahan anggaran Bantuan Pangan tersebut untuk membiayai program bantuan pangan dan Program Beras SPHP. Selain itu terdapat penambahan anggaran untuk RO

Koordinasi sebesar 20% dari alokasi anggaran sebelumnya. Alokasi anggaran yang cukup besar tidak diikuti dengan capaian realisasi yang diharapkan berdasarkan target. Demikian juga belum meratanya penyerapan anggaran di masing-masing RO di setiap Direktorat yang diakibatkan perencanaan kegiatan tidak terjadwal secara rutin. Terdapat sisa anggaran yang relative besar sehingga perlu dibuat perencanaan bulanan secara terukur sehingga pada akhir tahun tidak terjadi permasalahan.

IV.2. Permasalahan

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan pada Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama bulan JULI Tahun 2025 untuk memenuhi target output dan capaian outcome. Namun capaian kinerja realisasi keuangan dan fisik pada bulan Juli belum dapat maksimal, hal ini disebabkan karena :

1. Terdapat kegiatan penyaluran bantuan pangan yang nilai anggarannya cukup besar sehingga belum dilakukan perencanaan yang matang dalam hal penyiapan dokumen pembayaran.
2. Pembayaran honor petugas enumerator harga mengalami kendala karena ada perubahan mekanisme pembayaran.
3. Terdapat revisi untuk efisiensi belanja dan penyesuaian anggaran lingkup Badan Pangan Nasional, sehingga menghambat pelaksanaan persiapan pelaksanaan kegiatan.
4. Penyelesaian SPJ yang tidak tepat waktu mengakibatkan terhambatnya proses pengajuan penarikan anggaran pada bulan selanjutnya,
5. Masih ditemukan kendala/permasalahan pada penyaluran Bantuan Pangan sehingga berpengaruh terhadap proses pencairan anggaran.
6. Rendahnya realisasi penyaluran beras SPHP dari target yang telah ditetapkan sehingga berpengaruh pada realisasi anggaran operasional kegiatan.
7. Pelaksanaan Penguatan Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat melalui DAK Non Fisik Tahun baru terlaksana pada Triwulan II.
8. Perencanaan kegiatan yang tidak terjadwal secara baik.

IV.3. Rekomendasi

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama Tahun 2025 tetap berjalan sesuai petunjuk operasional kegiatan dan mempercepat pemenuhan dokumen pendukung realisasi periode bulan selanjutnya. Selain itu melakukan langkah strategi, antara lain:

1. Melakukan percepatan rencana penarikan anggaran baik melalui metode LS maupun TUP untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah secara rutin dan serta sosialisasi regulasi Perbadan.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia melalui koordinasi penyelesaian sisa pembayaran penyaluran Bantuan Pangan, penguatan pemantauan pelaksanaan DAK Non Fisik 2025, dan kegiatan lainnya lingkup DCP yang tidak termasuk dalam efisiensi Inpres.
4. Koordinasi secara intensif antar pihak terkait penyaluran bantuan pangan dan penyaluran beras SPHP.
5. Resosialisasi dan atau koordinasi lebih intensif dengan dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik terutama terkait dengan mekanisme dan kesesuaian penginputan pelaporan melalui ESAKIP DAK Non Fisik.
6. Melakukan koordinasi dengan pengelola keuangan.